

ABSTRAK

Sampah merupakan suatu penyebab dampak negatif bagi seluruh kehidupan masyarakat, mengingat begitu besar dampak negatif sampah bagi manusia, Salah satu yang memiliki tugas dalam pengelolaan sampah adalah pemerintah daerah, pemerintah daerah dituntut untuk sigap dan mandiri dalam melakukan kegiatan pengelolaan sampah, apa lagi kita sering melihat banyak tumpukan sampah yang tercampur dengan jenis limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), oleh karena itu pemerintah daerah wajib melakukan pengelolaan sampah.

Rumusan masalah yang penulis ambil adalah, (1) Bagaimana pelaksanaan Pasal 48 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah berkaitan dengan mencampur sampah dengan jenis limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu, (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi terhadap jenis sampah yang sudah tercampur dengan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), (3) Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam mengatasi pengelolaan sampah di Kota Bekasi terhadap dengan jenis sampah yang sudah tercampur limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan sampah yang sudah tercampur dengan jenis limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu, faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah serta upaya apa yang dilakukan pemerintah daerah Kota Bekasi terkait dengan sampah yang sudah tercampur dengan jenis limbah bahan berbahaya (B3) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu Kota Bekasi.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada (empiris). Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris* yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data berdasarkan fakta dilapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi masih belum efektif, hal tersebut dikarenakan minimnya kepedulian masyarakat Kota Bekasi terhadap kebersihan, terkait dengan mencampur sampah dengan jenis limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Kedua, beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, faktor pendukung seperti pembentukan Bank Sampah di setiap Kecamatan Kota Bekasi, kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah dan kegiatan pelatihan pengelolaan sampah di tingkat Kecamatan. Begitu juga faktor penghambat diantaranya adalah menurunnya kapasitas kelembagaan pengelolaan sampah, keterbatasan sarana dan prasarana dalam pengangkutan sampah, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan kurangnya ketersediaan lahan untuk membangun TPS di sumber sampah (RT/RW) skala komunal. Ketiga, upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut ialah penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kegiatan pengelolaan sampah, mengoptimalkan dan mengaktifkan kembali Bank Sampah di setiap tingkat Kecamatan Kota Bekasi, dan melakukan kerjasama dengan pihak swasta agar sampah yang sudah tercampur dengan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dapat diolah dan dimanfaatkan dengan baik.